

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe

Fatima Udin¹

Muhammad Yusra²

Dy Ilham Satria¹, Rany Gesta Putri²

fatima.190420149@unimal.ac.id¹, myusra@unimal.ac.id², dyilham@unimal.ac.id³,

ranygesta@unimal.ac.id⁴

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Kampus Bukit Indah Blang Pulo, Kec. Muara Satu-Lhokseumawe*

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Populasi dalam penelitian ini yaitu pejabat yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan yang terdiri dari 24 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Lhokseumawe. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 72 orang responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket kuesioner. Metode pengelolaan data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe, pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe, pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe.

Kata kunci: *Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*

Abstract

This study aims to examine the effect of understanding government accounting standards and internal control on the quality of SKPD financial reports. The population in this study are officials who carry out accounting and financial administrative functions consisting of 24 regional work units (SKPD) in Lhokseumawe City. Sampling in this study using purposive sampling and obtained as many as 72 respondents. This research is a quantitative research with primary data sources. The data collection technique in this study was to use a questionnaire. The data management method used is multiple linear regression analysis using SPSS 22. The results of this study indicate that the influence of understanding government accounting standards affects the quality of the financial

reports of the Lhokseumawe Regional Work Unit (SKPD), internal control does not affect the quality of the Work Unit's financial reports Regional Apparatus (SKPD) of Lhokseumawe City, the effect of understanding government accounting standards and internal control affects the quality of the financial reports of the Lhokseumawe City Regional Work Unit (SKPD).

Keywords: Understanding of Government Accounting Standards, Internal Control, Quality of Regional Work Unit (SKPD) Financial Reports

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki tujuh komponen adalah: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan tersebut perlu selidiki oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menerima masukan berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada empat opini yang diberikan pemeriksa adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menerbitkan Peraturan Walikota mengenai kebijakan akuntansi. Dengan adanya peraturan tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe berupaya menyusun laporan keuangan yang mengikuti peraturan walikota tersebut dan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Lhokseumawe yang lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang relevan, akuntabel, yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban yang bermanfaat dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan.

Opini BPK untuk laporan keuangan SKPD Tahun 2015-2021 Kota Lhokseumawe

Tahun	Opini BPK
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : aceh.bpk.go.id

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 Lhokseumawe kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK, namun pada tahun 2016 Lhokseumawe mendapatkan opini Wajar Dengan pengecualian dan pada tahun 2021 Lhokseumawe

kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penurunan opini karena terdapat permasalahan pada tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja bantuan sosial atas pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. (<https://aceh.bpk.go.id>)

Terdapat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah kota Lhokseumawe pada tahun 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ada ditemukannya beberapa permasalahan yaitu: terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah, pengadaan modal belana lanjutan pembangunan pengamanan pantai cunda meauraksa tidak sesuai ketentuan, hak tagih piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan belum

divalidasi, pengelolaan aset tetap pemerintah kota lhokseumawe belum sepenuhnya memadai dan pengendalian kewajiban kurang optimal dan membebani keuangan daerah. (Aceh.bpk.go.id)

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021 kepada tujuh kabupaten/kota oleh BPK dihadiri walikota, bupati, ketua DPRK, Sekda kepala BKD dan kepala inspektur masing-masing daerah.

Kepala BPK RI perwakilan Aceh Lumut Aryo Wibowo dalam sambutannya mengatakan perolehan opini WTP kepada tujuh kabupaten/kota yang diberikan BPK karena hasil laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 telah baik. Namun tidak semua unsur telah baik, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan kualitas hasil laporan laporan keuangannya harus ditingkatkan. Dia juga mengatakan, dengan pemberian opini WTP bukan suatu jaminan daerah tidak akan ada kesalahan lagi dalam hal laporan keuangan. Tapi untuk mendorong kualitas laporan keuangan untuk ditingkatkan. Selain itu daerah juga harus berkomitmen melakukan perbaikan laporan keuangan daerah. Kepala BPK perwakilan Aceh juga mengatakan daerah harus meningkatkan PAD, sementara pemungutannya belum maksimal. Daerah juga masih melakukan belanja atau penyusunan anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia. (<https://aceh.tribunnews.com>).

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dijelaskan bahwa masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan dan penyebab terjadinya hal tersebut adalah kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah disuatu pemerintah daerah, dimana kurangnya hal tersebut akan berepengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor lain yang terkait kualitas laporan keuangan antara lain pengetahuan dan pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAP). Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang bermutu. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan negara yang bagus pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban pemerintah yang baik dan benar dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku umum. Pemerintah Daerah harus memiliki Sumber Daya Manusia yang mampu menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 "tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia".

Penelitian yang dilakukan Restika Wahyuni (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa unsur pemahaman akuntansi berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman standar akan SAP, Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan). Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alief (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berepengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Siahn dkk (2020) yang menunjukkan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hasanah et al (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfauza & Rahayu (2021), menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Setia Murti (2019), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al (2021), mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintah yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Apabila laporan keuangan sudah dapat memberikan manfaat dalam membuat keputusan maka akan mendorong percepatan pembangunan dan pengatasan kemiskinan.

Bersarkan latar belakang penelitian adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori *Stewardship*

Menurut Haliah (2012) menyatakan bahwa teori stewardship adalah teori yang dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Menurut Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997), dalam Haliah (2012), menyatakan bahwa teori *stewardship* yaitu teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotifasi atas tujuan individu, melainkan sebagai pengelola yang motivasinya selaras dengan tujuan *perincipal* mereka. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah lebih memetingkan kebutuhan yang lebih tinggi seperti pertumbuhan entitas, prestasi, maupun aktualisasi diri. Dalam teori ini rakyat berperan sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto, dkk (2015), mengatakan bahwa pemerintah dianggap telah bekerja atas dasar motivasi dan pengabdian terhadap masyarakat. Pemerintah paham bahwa mereka memiliki tanggungjawab dalam mengelola sumberdaya yang ada dan tidak ada motivasi secara finansial yang mendasari tindakan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Mereka harus menggunakan wewenang mereka untuk kepentingan organisasi secara jangka panjang.

Teori Sinyal (*Signalling*)

Teori sinyal adalah teori tindakan yang diambil manajemen perusahaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan dari pada pihak investor. Karena itu, manajer memiliki tanggung jawab untuk memberikan sinyal kepada pasar mengenai kondisi perusahaan kepada para *stakeholders* dengan cara mempublikasikan laporan keuangan perusahaan (Anggradewi et al, 2005).

Teori Sinyal (*Signalling Teory*)

Teori Sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan *signal* ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian internal, pengungkapan yang lebih lengkap. Pemerintah daerah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih

lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita et al, 2010).

Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Menurut Siahaan et al (2021) Menyatakan bahwa suatu laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya apabila laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi yang baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik. Menyadari tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami akuntansi dan laporan keuangan maka diperlukan teknik untuk menganalisis laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi (2010), Mengatakan pengertian pengendalian internal merupakan “suatau proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen eksekutif dan jajaran untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika perangkat di suatu instansi kurang memahami standar akuntansi pemerintah maka akan mengurangi efisiensi perangkat kerja dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Namun apabila perangkat kerja memahami standar akuntansi pemerintah, maka akan sangat mudah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sihasale & Sulistiyo & Setiyowati (2018) yang menemukan hubungan yang positif signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alief (2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perangkat kerja masih banyak yang belum mengetahui dan memahami standar akuntansi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Menurut Gondodiyoto (2007), pengendalian internal merupakan suatu mekanisme yang didesain untuk menjaga (*preventif*), mendeteksi (*detektif*), dan memberikan mekanisme pembetulan (*korektif*) terhadap potensi atau kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) maupun penyalahgunaan (*fraud*). Sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal yang lemah, hal tersebut dinyatakan oleh Mardiasmo (2004) dan dengan adanya sistem pengendalian internal yang lemah dapat mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang kurang baik.

Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, untuk melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal berisi prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai. Jadi sistem pengendalian yang ada didalam pemerintah daerah dirancang untuk memudahkan pegawai atau aparatur untuk mencapai tujuan pemerintah daerah itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lastari & Dewi (2020) yang menemukan hubungan yang signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, (2010) yang menyatakan bahwa setiap dilakukannya peningkatan terhadap sistem pengendalian internal, maka akan meningkatkan pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan Nurfaeza & Rahayu (2021), menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Setia Murti (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan.

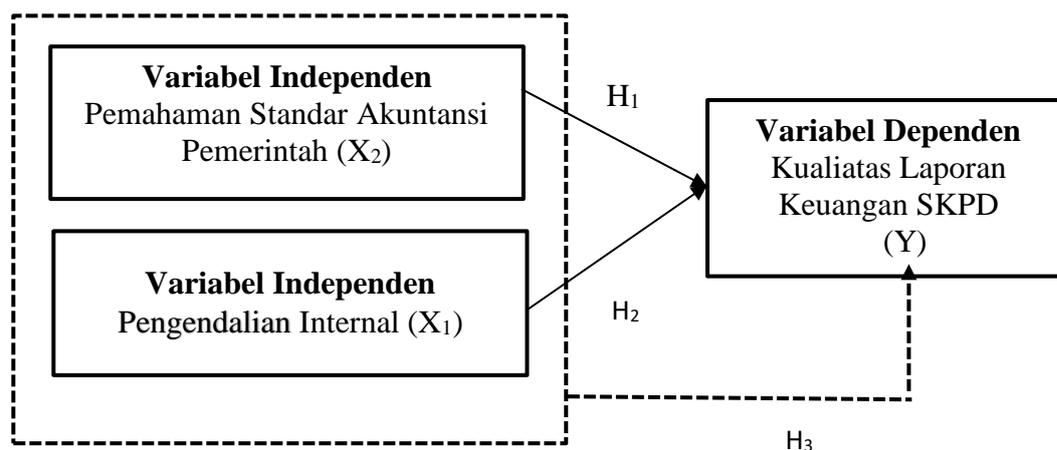
Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pemahaman akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik. Menyadari tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami akuntansi dan laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi, bagaimana menggunakan informasi keuangan maka diperlukan teknik untuk menganalisis laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya apabila laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Siahaan et al (2021) Menyatakan bahwa suatu laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya apabila laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 1

Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

- > : Uji Parsial (Uji Statistik t)
 - - - - -> : Uji Simultan (Uji Statistik F)

X_1 dan X_2 : Variabel Independen (Variabel Bebas)

Y : Variabel Dependen (Variabel Terikat)

H_1 , H_2 dan H_3 : Pembuktian Hipotesis

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe. Sedangkan lokasi untuk mendapatkan sumber data yaitu pegawai SKPD di Kota Lhokseumawe.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah general yang terdiri atas objek atau lokasi penelitian yang menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi pupolasi bukan hanya orang, tetapi objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (Sugiyono, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini yaitu pejabat struktur atau pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi dan tata usaha keuangan yang terdiri dari 24 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Lhokseumawe, yang terdiri dari 12 dinas, 2 kecamatan, 4 badan, 1 inspektorat, 1 satuan dan 4 lembaga keistimewaan. Dari setiap SKPD masing-masing diambil 3 pegawai sebagai responden yang terdiri dari Kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, staff kasubag keuangan yang berjumlah 72 responden.

Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut (Sugiyono,2018). Penelitian ini menggunakan teknik

pemngambilan sampel dengan purposive sapling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan penarikan sampel bertujuan. Kriteria sampel yang diambil dari penelitian ini adalah pegawai yang menjabat sebagai kasubag keuangan, bendahara pengeluaran dan staff kasubag keuangan tiap kantor SKPD Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 34 SKPD. Pada penentuan sampel tersebut, peneliti menetapkan 24 kantor SKPD pemerintahan dengan mengecualikan beberapa dinas, badan dan kecamatan tidak dijadikan sampel karena berbagai hal seperti ada kantor yang tidak menyetujui untuk dijadikan tempat penelitian atau tidak direspon surat penelitiannya dengan jangka waktu yang terlalu lama. Dari sampel tersebut diambil 3 orang pegawai yang memnuhi kriteria untuk dijadikan responden. Sehingga jumlah sampel penelitian ini adalah 24×3 orang = 72 orang responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif. Menurut Ghozali (2006) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada pradigma positivisme untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan menggunakan hipotesis untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang akan didapatkan secara langsung dari responden atau subjek penelitian yaitu dapat berupa kuesioner dan wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket kuisisioner. Penelitian ini menggunakan skala ordinal, menurut sugiyono (2017) skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2017).

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau munculnya variabel terikat (Sugiyono, 2017).

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen ini biasa disebut juga variabel terikat dimana variabel inilah yang menjadi variabel yang akan dipengaruhi (Sugiyono, 2017).

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:51), uji Validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner, suatu kuisisioner bisa dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pungujian Validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* merupakan cara menghitung korelasi antara nilai yang

diperoleh dari pernyataan-pernyataan dengan tingkat kesalahan 5%, jika nilai *Pearson Correlation* $< 0,05$ disebut valid.

Menurut Ghozali (2018:45), Uji Reabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikatornya dari variabel atau konstruk. Suatu Kuisioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan merupakan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, uji reabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuisioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan *reliabel* jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian Cronbach Alpha (α), suatu variabel dikatakan *reliabel* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,07$.

Analisi Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* VIF dan *tolerance*. Regresi bebas dari multikolinieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,010$ (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018), menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan *heteroskedastisitas*, model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas (Ghozali, 2018).

Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, jika terdapat pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka, tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

Penelitian ini menggunakan uji *Glejser* untuk menguji heteroskedastisitas, uji statistik ini dapat lebih menjamin keakuratan hasil. Kriteria dari *Gleser* adalah apabila nilai T statistika dari seluruh variabel masing-masing memiliki nilai p value $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian

variabel tersebut tidak mengalami masalah heteroskedastisitas dan data tersebut dapat dikatakan bersifat homoskedastisitas (Ghozali, 2018).

Uji Normalitas

Menurut Santoso (2004), menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengukur sesuatu apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen, keduanya mempunyai distribusi normal atau mendeteksi normal. Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan Normal Probability (P-P Plot) Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distributor dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.

Selain dengan grafik dalam penelitian normalitas data juga dilihat dengan menggunakan uji statistik non parametik. Kolmogorov-Smirnov pada alpha sebesar 5%, jika nilai signifikan dari pengujian Kolmogorov Smirnov $> 0,05$ berarti data normal.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan analisis linear berganda dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	: Kualitas Laporan Keuangan SKPD
X1	: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
X2	: Pengendalian Internal
b1b2	: Koefisien regresi
a	: Konstantan
e	: Emsilon atau variabel pengganggu

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikan Individual (Uji t)

Menurut Sujarweni (2014), uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kriteria t adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$, secara parsial berpengaruh, namun sebaliknya jika signifikan $> 0,05$, secara parsial tidak berpengaruh.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka secara parsial berpengaruh, namun sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka secara parsial tidak berpengaruh.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Menurut Sujarweni (2014), uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, kriteria uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$, secara simultan berpengaruh, namun sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$, secara simultan tidak berpengaruh.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara simultan berpengaruh, namun sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara simultan tidak berpengaruh.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemkot Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +24 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 04o54' Lintang Utara dan 05o18' Lintang Selatan, serta 96o20' dan 97o21' bujur Timur. Luas Wilayah Kota Lhokseumawe, adalah berupa daratan seluas 181, 06 km² 60% dari luas Kota Lhokseumawe merupakan wilayah pemukiman penduduk yang mana dengan Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 sebanyak 191.396.

Berdasarkan letak Geografisnya Kota Lhoksemawe berada pada pulau Sumatra yang menjadi bagian dari kepulauan Indonesia. Kota lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara dan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatra. Posisi Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan, menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur distribusi dan perdagangan di Aceh. Ketika terbentuknya pada tahun 2001, Kota Lhokseumawe terdiri atas tiga kecamatan. Hingga saat ini Kota Lhokseumawe terdiri atas 4 kecamatan dan 68 gampong kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Muara Satu sebagai pecahan dan kecamatan muara.

Akhir tahun 2020, Wilayah Administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 wilayah kecamatan, dengan masing-masing luas Wilayah, Blang Mangat sebesar 56,12 km², Muara Dua sebesar 57, 80 km², Muara Satu sebesar 55, 90 km², Banda Sakti sebesar 11, 24 km².

Gambaran Umum Kuesioner

Penyebaran kuisisioner kepada responden dilakukan secara langsung kepada pejabat struktur atau pegawai yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran, bendahara pemasukan, dan kasubbag keuangan di 34 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di Kota Lhokseumawe, namun hanya 24 SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) yang merespon surat penelitian sedangkan 10 SKPD tidak merespon surat penelitian yang telah di berikan, jadi hanya 24 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dearah) yang dapat disebar kuisisioner, yang terdiri dari 11 dinas, 2 kecamatan, 4 badan, 1 inspektorat, 1 satuan, 1Sekretariat Dewan dan 4 lembaga keistimewaan. Waktu penyebaran dan pengembalian kuisisioner dilakukan dalam waktu satu bulan yaitu pada 10 April sampai 10 Mei 2023. Jumlah kuisisioner yang dibagikan sebanyak 72 kuisisioner, adapun kuisisioner yang diterima kembali oleh peneliti adalah sebanyak 72 kuisisioner sehingga responden rate 100% dan kuisisioner yang tidak kembali sebanyak 0 kuisisioner sehingga data yang siap diolah yaitu sebanyak 72.

Tabel 1
Sampel dan Tingkat Pengembalian

Kuisisioner	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang disebar kepada responden	72
Kuisisioner yang direspon responden	72
Tingkat pengembalian kuisisioner	100%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Karakteristik Responden**Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Tabel 2
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin			
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	23	31.95%
2	Perempuan	49	68.06%
	Jumlah	72	100.00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Usia			
No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	23-34 Tahun	15	20.84%
2	35-44 Tahun	32	44.45%
3	45-54 Tahun	20	27.78%
4	55-60 Tahun	5	6.95%
	Jumlah	72	100.00%

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir			
No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SMA/ Sederajat	6	8.34%
2	Diploma (DIII)	5	6.95%
3	Sarjana (S1)	57	79.17%
4	Pasca Sarjana (S2)	4	5.56%
5	Doktoral (S3)	0	0.00%
	Jumlah	72	100.00%

Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 5
Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase
1	Kasubag Keuangan	22	30.56%
2	Bendahara Pengeluaran	21	29.17%
3	Pegawai Sub Bagian Keuangan	29	40.28%
	Jumlah	72	100.00%

Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 6
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja			
No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1	1-5 Tahun	26	36.12%
2	5-10 Tahun	13	18.06%
3	10 Tahun	33	45.84%
	Jumlah	72	100.00%

Analisi Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden pada setiap SKPD Kota Lhokseumawe. Variabel dependen merupakan kualitas laporan keuangan SKPD. Variabel independen adalah standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal. Jumlah sampel sebanyak 72 responden sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 7
Data Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)	36.82	3.570	72
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	37.17	4.259	72
Pengendalian Internal (X2)	32.79	4.630	72

Uji Validitas

Uji validitas digambarkan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap pertanyaan yang diajukan dan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas suatu kuesioner atau pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel yaitu angka hasil korelasi antara skor pertanyaan dan skor keseluruhan pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuesioner. Menurut Ghazali (2018:51), dasar pengambilan keputusan valid atau tidaknya data yaitu jika nilai signifikansi *pearson correlation* < 0,05 dan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid.

Tabel 8 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X₁)

Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (nilai r_{hitung})	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikansi	Keterangan
X1.1	0,602	0.1954	0,000	Valid
X1.2	0,666	0.1954	0,000	Valid
X1.3	0,768	0.1954	0,000	Valid
X1.4	0,727	0.1954	0,000	Valid
X1.5	0,624	0.1954	0,000	Valid
X1.6	0,308	0.1954	0,000	Valid
X1.7	0,598	0.1954	0,000	Valid
X1.8	0,655	0.1954	0,000	Valid
X1.9	0,715	0.1954	0,000	Valid
X1.10	0,685	0.1954	0,000	Valid

Tabel 9 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal (X2)

Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (nilai r_{hitung})	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikansi	Keterangan
X2.1	0,662	0.1954	0,000	Valid
X2.2	0,652	0.1954	0,000	Valid
X2.3	0,643	0.1954	0,000	Valid
X2.4	0,708	0.1954	0,000	Valid
X2.5	0,644	0.1954	0,000	Valid
X2.6	0,637	0.1954	0,000	Valid
X2.7	0,621	0.1954	0,000	Valid
X2.8	0,664	0.1954	0,000	Valid
X2.9	0,440	0.1954	0,000	Valid

Tabel 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)

Pertanyaan	Nilai Pearson Correlation (nilai r_{hitung})	Nilai r_{tabel}	Nilai Signifikansi	Keterangan
Y.1	0,580	0.1954	0,000	Valid
Y.2	0,654	0.1954	0,000	Valid
Y.3	0,617	0.1954	0,000	Valid
Y.4	0,780	0.1954	0,000	Valid
Y.5	0,797	0.1954	0,000	Valid
Y.6	0,745	0.1954	0,000	Valid
Y.7	0,704	0.1954	0,000	Valid
Y.8	0,688	0.1954	0,000	Valid

Pada tabel 4.9 diketahui nilai r_{tabel} untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ($p = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau n . Oleh karena $n = 72$, maka derajat bebasnya (df) adalah $n - 2$ ($72 - 2 = 70$). Nilai r_{tabel} pada $df = 70$ dan $p = 0,05$ adalah 0.1954. r_{hitung} merupakan total nilai *pearson correlation*. Butir pertanyaan untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1) dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir kuesioner dinyatakan valid dan layak untuk di analisis lebih lanjut untuk tabel hasil uji validitas variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1) yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Pada tabel 4.10 diketahui nilai r_{tabel} untuk diuji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikan 5% ($p = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau n . Oleh karena $n = 72$, maka derajat bebasnya (df) adalah $n - 2$ ($72 - 2 = 70$). Nilai r_{tabel} pada $df = 70$ dan $p = 0,05$ adalah 0.1954. r_{hitung} yaitu total nilai *pearson correlation*. Butir pertanyaan untuk variabel pengendalian internal (X2) dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dari hasil output diatas bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir kuesioner dinyatakan valid dan layak untuk di analisis lebih lanjut. Untuk tabel hasil uji validitas variabel pengendalian internal (X2) yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Pada tabel 4.11 diketahui nilai r_{tabel} untuk uji satu sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% ($p = 0,05$) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau n . Oleh karena $n = 72$, maka derajat bebasnya (df) adalah $n - 2$ ($72 - 2 = 70$). Nilai r_{tabel} pada $df = 70$ dan $p = 0,05$ adalah 0.1954. r_{hitung} yaitu total nilai *pearson correlation*. Butir pertanyaan untuk variabel kualitas laporan keuangan SKPD dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga butir kuesioner dinyatakan valid dan layak untuk di analisis lebih lanjut. Untuk tabel hasil uji validitas variabel kualitas laporan keuangan SKPD yang lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Uji Reliabilitas

Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach'Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)	.844	Reliabel
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.838	Reliabel
Pengendalian Internal (X2)	.804	Reliabel

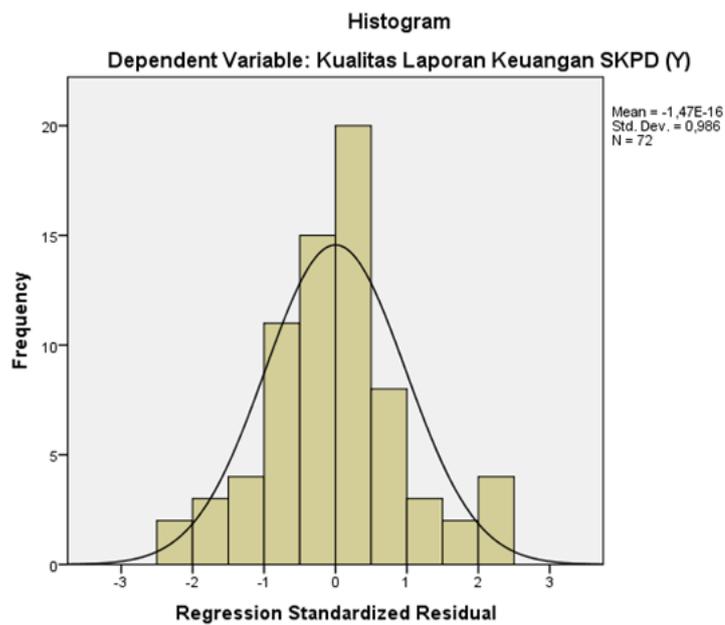
Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,06 sehingga dapat dikatakan kuesioner penelitian yang digunakan adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

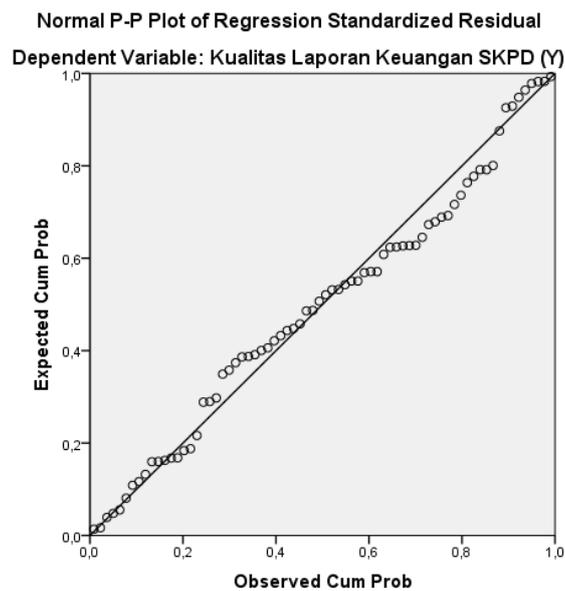
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya data yang dianalisis. Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan pp-plots.

1. Grafik Histogram



Gambar 2 Grafik Histogram

2. Grafik Normal PP-plots



Gambar 3 Grafik Normal PP-plots

Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada data yang mengikuti garis diagonal membentuk lonceng berada di tengah-tengah.

Berdasarkan gambar grafik normal PP-Plots dapat disimpulkan bahwa kurva telah berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat pada kurva normal PP-Plots terlihat titik-titik menyebar mendekati garis diagonal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas atau tidak yaitu dengan uji VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi tersebut dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	1.000	1.000
	Pengendalian Internal (X2)	1.000	1.000

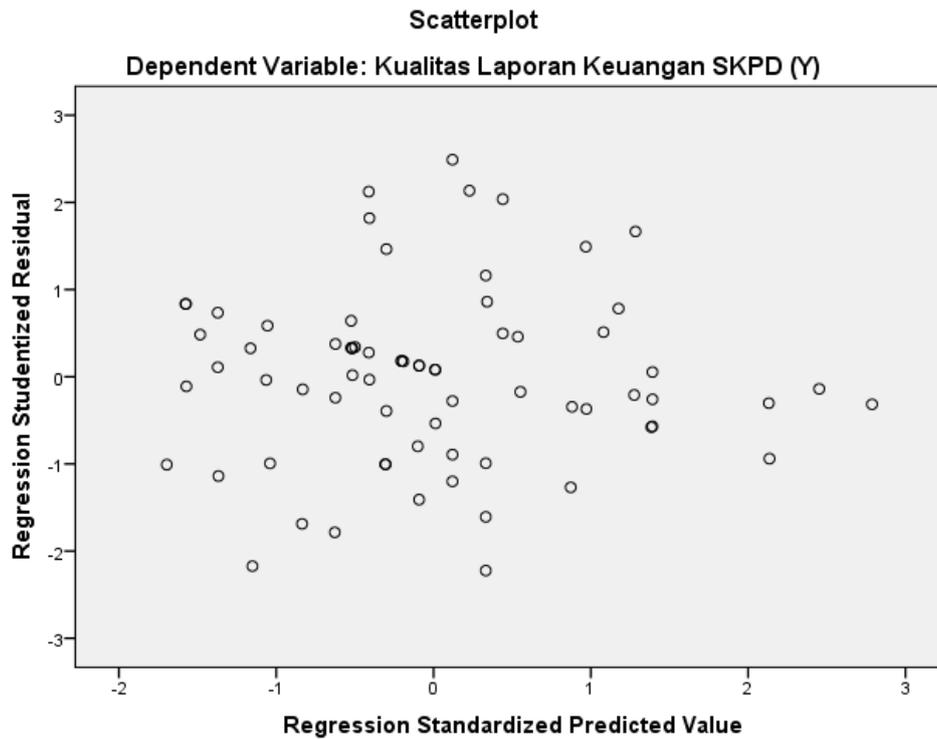
a. Dependent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)

Dari hasil penelitian tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa angka toleransi semua variabel independen $> VIF\text{-nya} < 10$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*, yang dapat dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik *scatterplot*, dimana bila ada titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *scatterplot* dapat dilihat pada daftar lampiran. Selain dengan *scatterplot*, dapat dilakukan juga dengan uji Glejser yaitu dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013).



Gambar 4.3 Scatterplot

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.3 di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.

Tabel 13 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.352	3.524		.667	.507
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	-.035	.058	-.073	-.611	.543
	Pengendalian Internal (X2)	.040	.078	.062	.521	.604

a. Dependen Variabel: Abs_Res

Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1) adalah 0,755. Sementara, nilai signifikansi (Sig.) untuk

pengendalian internal (X2) adalah 0,981. karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar 0,05 maka sesuai dalam uji Glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen untuk menduga variabel dependen.

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Dan Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,529	5,410		2,500	.015
	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.320	.089	.394	3,613	.001
	Pengendalian Internal (X2)	.163	.119	.149	1,370	.175

a. Dependen Variabel: Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.15 dari uji regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta (α) dari model regresi adalah 13,529 dan koefisien regresi (b) dari setiap variabel-variabel independen diperoleh $b_1 = 0,320$, $b_2 = 0,163$. Berdasarkan nilai konstanta dan koefisien regresi tersebut, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 13,529 - 0,320X_1 - 0,163X_2 + e$$

Dari nilai formulasi di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 13,529, artinya jika variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) dianggap konstanta, maka besarnya tingkat kualitas laporan keuangan SKPD (Y) adalah sebesar 13,529.
2. Koefisien regresi X_1 pemahaman standar akuntansi pemerintah atau b_1 memiliki koefisien regresi berganda positif sebesar 0,320 artinya setiap kenaikan pemahaman standar akuntansi pemerintah (X_1) sebesar 1%, di prediksi akan menaikkan kualitas laporan keuangan SKPD (Y) sebesar 0,320 dan pengendalian internal (X_2) dianggap konstan, maka besarnya tingkat kualitas laporan keuangan SKPD (Y) adalah 13,529.
3. Koefisien regresi X_2 (pengendalian internal) atau b_2 memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,163 artinya setiap kenaikan pengendalian internal (X_2) sebesar 1%, di prediksi akan menaikkan kualitas laporan keuangan SKPD (Y) sebesar 0,163.

Pengujian Hipotesis

Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe untuk melihat pengaruh atau tidak antara variabel penelitian, di uji dengan:

Uji Parsial (Uji t)

Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, maka ditentukan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, secara parsial berpengaruh, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$, secara parsial tidak berpengaruh
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka secara parsial berpengaruh, namun sebaliknya, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka secara parsial tidak berpengaruh.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel, maka dapat diketahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel berikut ini:

1. Pengaruh variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Dari hasil pengujian secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,613, sementara nilai t_{tabel} dicari pada tabel statistik (lihat pada lampiran) dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%. Karena menggunakan pengujian satu arah maka nilai t_{tabel} didasarkan pada rumus $df = k-1 = 72-1 = 71$ dan dilihat pada kolom 0,05 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,66660. Dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,613 > 1,66660$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi (b) bertanda positif, maka H_1 diterima, artinya pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

2. Pengaruh variabel pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Dari hasil pengujian secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,370, sementara nilai t_{tabel} dicari pada statistik (lihat pada lampiran) dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%. Karena menggunakan pengujian satu arah maka nilai t_{tabel} didasarkan pada rumus $df = k-1 = 72-1 = 71$ dan dapat dilihat pada kolom 0,05 (dapat dilihat pada lampiran) maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,66660. Dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $1,370 > 1,66660$ dengan nilai signifikansi $0,175 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi serta nilai koefisien regresi (b) bertanda negatif maka H_2 ditolak, artinya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan, maka ditentukan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, secara simultan berpengaruh, namun sebaliknya jika nilai signifikansi jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka parsial tidak berpengaruh.
2. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara simultan berpengaruh, namun sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara parsial tidak berpengaruh.

Tabel 15 Hasil Uji Secara Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	162.296	2	81.148	7.565	.001
	Residual	740.148	69	10.727		

	Total	902.444	71			
a. Dependen Variabel: Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Y)						
b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal (X2), Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)						

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 7,565. Sementara nilai F_{tabel} dicari pada tabel statistik (lihat pada lampiran) dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan rumus $F_{tabel} : F(k ; n-k) = F(2 ; 72-2) = F(2 ; 70)$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,13 dengan nilai signifikansi $0.001 < 0,05$, maka H_3 diterima, artinya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Artinya dengan pemahaman standar akuntansi pemerintah yang memadai akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD di kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 22, hasil pengujian secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,613, sementara nilai t_{tabel} dicari pada tabel statistik (lihat pada lampiran) dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%. Karena menggunakan pengujian satu arah maka nilai t_{tabel} didasarkan pada rumus $df = k-1 = 72-1 = 71$ dan dilihat pada kolom 0,05 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,66660. Dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,613 > 1,66660$ dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ serta nilai koefisien regresi (b) bertanda positif, maka H_1 diterima.

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena didukung dengan teori *Stewardship* dimana dalam teori ini masyarakat bereperan sebagai *principal* dan pemerintah dianggap sebagai *steward* yang bertanggung jawab kepada *principal* dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan daerah, untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satunya yang paling utama dalam pembuatan laporan tersebut ialah setiap pegawai harus memahami standar akuntansi pemerintah dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan dipertanggung jawabkan serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang berpengaruh jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Angraini (2017), yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan jika pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa, jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS 22 menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Dari hasil pengujian secara parsial sebagaimana terlihat pada tabel di atas bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,370, sementara nilai t_{tabel} dicari pada statistik (lihat pada lampiran) dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%. Karena menggunakan pengujian satu arah maka nilai t_{tabel} didasarkan pada rumus $df = k-1 = 72-1 = 71$ dan dapat dilihat pada kolom 0,05 (dapat dilihat pada lampiran) maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,66660. Dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $1,370 > 1,66660$ dengan nilai signifikansi $0,175 > 0,05$ serta nilai koefisien regresi serta nilai koefisien regresi (b) bertanda negatif maka H_2 ditolak, artinya pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi tidak mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Penerapan pengendalian internal secara lengkap dan menyeluruh belum sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Di dalam pelaksanaan pengendalian internal secara terus menerus setiap hasil temuan belum tentu dapat mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi, sehingga menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dinilai dari efektifitas pengendalian internal saja, sehingga aparatur pemerintah harus mampu memenuhi aspek-aspek lain untuk menghasilkan laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Aspek-aspek tersebut diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahartini Ayu (2021), yang menunjukkan nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,078 dengan tingkat signifikansi variabel sistem pengendalian intern 0,378 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Karangsem. Dan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pasha dan Narotama (2018), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah yang disajikan. Hasil uji F kedua variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal memiliki nilai yang signifikansi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan hasil pengujian pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 7,565. Sementara nilai F_{tabel} dicari pada tabel statistik (lihat pada lampiran) dengan taraf signifikansi (α) 0,05 dan tingkat kepercayaan 95% menggunakan rumus

Ftabel : $F(k; n-k) = F(2; 72-2) = F(2; 70)$ diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,13 dengan nilai signifikansi $0.001 < 0,05$, maka H_3 diterima. Yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan SKPD.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe.
2. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe.
3. Pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Lhokseumawe.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan variabel independen yang hanya menggunakan dua variabel independen sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan SKPD.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pemerintah Daerah
Satuan kerja perangkat daerah Kota Lhokseumawe hendaknya dapat meningkatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan jalan melakukan seminar atau kursus khusus agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dan SKPD hendaknya dapat meningkatkan penerapan pengendalian internal agar dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah responden, tidak hanya mengambil sebagian SKPD tetapi seluruh SKPD yang ada pada Kota Lhokseumawe dan menambah variabel lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi dan sebagainya yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Abiola, Oyewole. 2013. Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13 (5).
- Afifah & Nunuy, N. 2009. *Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana Prenada Media Grup.
- Aghnia, N. & Sri, R. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan. Vol.8 No, 3 (2021).

- Anindhita, K, S. (2019). **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten)**. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Apriliana, G, I. (2019). **Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja pemerintah daerah kabupaten banyumas tahun 2018)**. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Arlia, S. A. (2016). **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
Diakses dari: <https://aceh.bpk.go.id/bpk-perwakilan-provinsi-aceh-serahkan-lhp-atas-lkpd-pemerintah-kota-lhokseumawe-ta-2016/>.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Diakses dari: <https://bpkd.lhokseumawekota.go.id/article-untuk-ke-8-kalinya-pemko-lhokseumawe-meraih-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-tahun-2019.html>
- Haliah. 2012. *Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Disertasi doktor pada FPS UNHAS makasar
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, S. & Siregar, S.R.T (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*: Vol.9, No. 1, 2021
- Heni, S. & Sri, R. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *E-proceeding of management*: Vol.6, No.1 April 2019, 660-667.
- Kholila, P. (2019). **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Padang Lawas**. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Lestari, N.L.W.T., & Dewi, N.N.S.R.T (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi* ;Vol. 11, No. 2 Januari 2020, pp. 170-178
- Mahmudi (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Nordiawan, D. & Ayuningtyas, H. **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Nordiawan, D. Iswahyudi, S, P. & Maulida, R. **"Akuntansi Pemerintahan"**. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008.
- Nugraeni, Budiantara, M (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualutas Laporan Keuangan dan Implementasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja, *JDEB*: Vol. 12 No. 1
- Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
- Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
<https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- Restika, W. 2021. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*. Vol.2 No.1.
- Sari, Maeka, M.Y.P.N, Adiputra, P.M.I & Sujana, E (2014) Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi daerah (Studi kasus pada dinas-dinas di pemerintah kabupaten jembrana), E-Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol: 2 No. 1.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak A (2020). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (*Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuan Batu Utara*). *Jurnal Manajemen* 6 (2). <http://ejournal.immimedan.net>
- Sihasaléh, D.C, Sulistyó, S., & Setiyowati, S.W (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi SDM (*Studi Empiris Pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang*). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 6(1). [Http://doi.org/10.21067/jrma.v6i1.4209](http://doi.org/10.21067/jrma.v6i1.4209)
- Siti, H., & Tapi, R.S.S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.9 No.1.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati & Riana, S.D (2014). Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR-Study & Accounting Research* Vol. XI, No.1.
- Wibawa, K.A.S, dkk. 2017. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng, *E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Vol. 2 No. 8.

